

INDUSTRI NIKEL INDONESIA: REGULASI VS REALITAS DI LAPANGAN



DI BALIK ANGKA, ADA KRISIS

Indonesia memasok hampir setengah dari kebutuhan nikel dunia, logam penting untuk baja nirkarat, baterai kendaraan listrik dan transisi energi global. Namun, di balik kejayaan angka produksi, muncul pertanyaan yang lebih mendesak: apakah industri ini membawa kemajuan berkelanjutan atau justru memicu krisis lingkungan dan sosial?

Bagian ini mengupas tiga tantangan utama yang harus diketahui jurnalis ketika meliput industri nikel di Indonesia: kerusakan lingkungan, penggusuran komunitas, dan lemahnya penegakan hukum.

TIGA MASALAH UTAMA

1. Kerusakan Lingkungan dan Hancurnya Keragaman Hayati

- a. Limbah tambang mencemari sumber air dengan logam berat dan sedimen.

- b. Deforestasi masif akibat ekspansi konsesi tambang.
- c. Ketergantungan pada PLTU batu bara memperbesar emisi karbon.

2. Penggusuran Komunitas

- a. Masyarakat lokal dan adat kehilangan tanah dan sumber penghidupan.
- b. Konsultasi dan kompensasi tidak dijalankan sesuai prinsip FPIC.
- c. Terjadi penghapusan budaya secara sistematis.

3. Tata Kelola yang Lemah

- a. Tambang ilegal marak dan mengabaikan standar keselamatan.
- a. Ada dugaan keterlibatan aparat dan elit lokal dalam melindungi tambang ilegal.
- b. Penegakan hukum tumpul, regulasi hanya kuat di atas kertas

PETA MASALAH: APA YANG HARUS DICARI JURNALIS DI LAPANGAN?

Masalah	Tanda-Tanda Lapangan	Pertanyaan Investigatif
Pence- maran Air	Air sungai berwarna, keruh, tidak layak minum	Apakah warga mengalami gangguan kesehatan setelah tambang beroperasi?
Deforestasi	Hutan gundul di sekitar konsesi tambang	Apakah izin alih fungsi hutan dikeluarkan secara transparan?
Peng- gusuran	Warga dipindahkan tanpa ganti rugi jelas	Apakah ada dokumentasi konsultasi publik se- belum proyek dimulai?
Tambang Ilegal	Aktivitas tambang tanpa papan izin resmi	Siapa yang melindungi tambang ilegal? Apakah ada keterlibatan aparat?
Kerugian Ekonomi	Fasilitas dasar seperti jalan dan jembatan rusak, harga- harga kebutuhan pokok lebih tinggi dari wilayah lain	1. Berapa besar biaya hidup setelah tambang dan smelter ada, dibanding sebelum mereka ada? 2. Berapa banyak waktu terbuang untuk melakukan sesuatu dibanding sebelum ada tambang dan smelter? 3. Berapa banyak ongkos yang harus keluar untuk memperbaiki ladang, sumur, dan jalan dibanding sebelum ada tambang dan smelter? 4. Berapa banyak ongkos kesehatan yang harus keluar dibanding sebelum ada tam- bang dan smelter? 5. Berapa banyak ongkos berusaha yang harus keluar dibanding sebelum ada tambang dan smelter? (BBM untuk melaut, rehabilitasi ladang yang kena polusi air dan debu, dll)
Hancurnya Keraga- man Hayati	Hilangnya satu flora atau fauna dari sebuah rantai makanan di darat dan di perairan	Sejak kapan hama tikus makin banyak? (hi- langnya predator tikus dari alam)

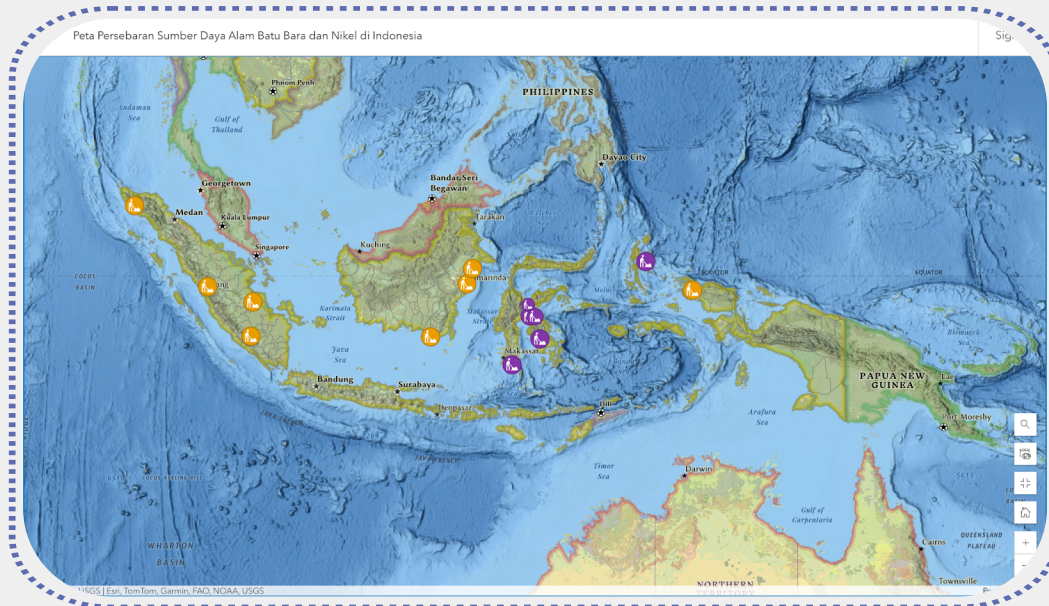
CATATAN UNTUK REDAKSI

- Hindari narasi netral yang menggambarkan produksi nikel hanya dari sisi per-
tumbuhan ekonomi.
- Soroti kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan.

- Gunakan visual: peta konsesi tambang, foto deforestasi, atau kutipan langsung dari warga.

APA YANG PERLU DITEKANKAN? Industri nikel Indonesia bukan sekadar cerita bahan baku transisi energi. Ini adalah cerita tentang benturan antara ambisi global dan keadilan lokal. Tugas jurnalis adalah membongkar narasi dominan, mencari suara yang hilang, dan menunjukkan siapa yang paling terdampak dari industri yang katanya “hijau” ini.

KERANGKA REGULASI INDUSTRI NIKEL: ANTARA ATURAN DAN AKSI DI LAPANGAN



PENDAHULUAN: REGULASI BERLAKU, IMPLEMENTASI TERTINGGAL

Indonesia memiliki salah satu kerangka hukum pertambangan paling lengkap di Asia Tenggara. Tapi seberapa efektif aturan itu melindungi masyarakat dan lingkungan dalam praktiknya? Bagian ini membedah struktur hukum dari izin tambang hingga pengolahan nikel, serta kontradiksi antara ambisi hukum dan kenyataan lapangan.

POKOK-POKOK REGULASI PERTAMBANGAN NIKEL

1. Perizinan dan Standar Teknis

- Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) wajib dimiliki sebelum eksplorasi dan produksi.

- Tujuan utamanya adalah kepatuhan terhadap standar lingkungan, keselamatan kerja, dan tata ruang.

2. AMDAL – Analisis Dampak Lingkungan

- Wajib dilakukan oleh semua perusahaan tambang.
- Harus memuat rencana mitigasi atas risiko pencemaran air, deforestasi, dan dampak sosial.

3. Larangan Ekspor Bijih Mentah dan Kewajiban Smelter

- Berlaku sejak Januari 2020.
- Tujuan: memperkuat industri hilir, menciptakan lapangan kerja, dan menambah nilai ekonomi lokal.

- o Masalah utama: keterlambatan pembangunan smelter, inkonsistensi kebijakan, dan kendala logistik.

KONFLIK REGULASI: HUKUM TANAH DAN HAK MASYARAKAT ADAT



KETIKA HUKUM DIJUNGKIRBALIKAN

Regulasi di atas kertas bisa tampak sempurna. Tapi ketika praktik tambang ilegal dibiarkan dan korupsi mengakar, seluruh sistem hukum kehilangan maknanya. Bagian ini menelusuri bagaimana praktik korupsi dan tambang ilegal saling memperkuat, serta dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan integritas institusi.

BAGAIMANA KORUPSI BEROPERASI DI LAPANGAN?

1. Kompensasi Lahan yang Tak Adil

- o Pemilik lahan menerima nilai jauh di bawah harga pasar.
- o Terdapat tekanan dari aparat dan pihak perusahaan agar warga menandatangani dokumen.
- o Dokumen kepemilikan resmi tidak menjamin perlindungan hukum.

2. Tambang Ilegal Merajalela

- o Operasi tanpa IUP, tanpa AMDAL, tanpa pengawasan.

- Didorong oleh permintaan pasar dan celah ekspor.
- Diduga dilindungi oleh oknum pejabat lokal atau aparat keamanan.

3. Institusi Lemah, Hukum Mandul

- Penegakan hukum bersifat selek-

tif.

- Institusi pengawas kehilangan independensi akibat tekanan politik atau finansial.
- Pelanggaran besar kerap tidak ditindak, pelanggar kecil dijadikan simbol penegakan.

PETA DAMPAK: SIAPA YANG PUNYA KUASA, SIAPA YANG MENANGGUNG RISIKO?

Pelaku	Aksi	Dampak
Perusahaan nakal	Menekan warga untuk jual tanah dengan harga murah	Penggusuran, kehilangan sumber hidup
Aparat lokal	Melindungi tambang ilegal	Hilangnya supremasi hukum
Pemerintah pusat	Lalai dalam pengawasan	Rusaknya kepercayaan publik

PERTANYAAN PENTING

- Apakah terdapat aktivitas pertambangan tanpa papan izin atau dokumen resmi?
- Siapa yang paling diuntungkan dari operasi tambang tersebut?
- Apakah ada aparat yang aktif mengamankan tambang ilegal?
- Bagaimana proses pembebasan lahan berlangsung? Adakah intimidasi?
- Apakah warga menerima kompensasi yang adil dan berdasarkan penilaian independen?

KESIMPULAN: TANTANGAN SISTEMIK YANG TAK BISA DIABAIKAN

Industri nikel Indonesia saat ini berada

dalam paradoks: regulasi yang ambisius, tetapi praktik yang permisif. Tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, ia adalah pintu masuk bagi korupsi sistemik, ketidakadilan struktural, dan kerusakan ekosistem yang tak bisa dibalikkan.

Tugas jurnalis bukan hanya melaporkan peristiwa, tapi menghubungkan titik-titik: siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mengambil untung, dan siapa yang harus membayar harga tertingginya.

Bagian selanjutnya akan menyelami hak-hak hukum internasional yang dilanggar dalam konteks industri nikel, mulai dari hak atas air bersih hingga hak atas partisipasi.

KOMITMEN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL: ANTARA JANJI IKLIM DAN REALITAS AGRARIA

PENDAHULUAN: DUA WAJAH KOMITMEN INDONESIA

Di forum internasional, Indonesia tampil sebagai negara yang mendukung aksi iklim dan perlindungan hutan. Namun di dalam negeri, konflik lahan dan deforestasi terus berlanjut. Bagian ini menelaah kontradiksi tersebut dari sudut pandang hukum dan tata kelola agraria.

KOMITMEN IKLIM INDONESIA DI FORUM INTERNASIONAL

- **Paris Agreement (2015)**
 - Janji menurunkan emisi GRK dan membatasi pemanasan global di bawah 2°C.
 - Target ambisius: 1,5°C.
 - Prinsip keadilan: Negara maju memimpin pengurangan, nega-

ra berkembang dihimbau tetap menghormati HAM.

- **NDC 2022**
 - Komitmen mandiri: Pengurangan 32% emisi (tanpa bantuan luar).
 - Komitmen bersyarat: Pengurangan 43% (dengan dukungan internasional).
 - Penilaian Climate Action Tracker: "sangat tidak memadai".
- **Deklarasi Hutan New York & COP26**
 - Janji kurangi kehilangan hutan alam hingga setengah pada 2020.
 - Komitmen akhiri degradasi hutan pada 2030.

APA YANG PERLU DIKAWAL JURNALIS?

Komitmen	Realitas	Pertanyaan Investigatif
Penurunan emisi	Ketergantungan tinggi pada PLTU untuk smelter nikel	Apakah proyek hilirisasi justru meningkatkan jejak karbon nasional?
Perlindungan hutan	Deforestasi akibat tambang dan proyek industri	Apakah kawasan hutan dilindungi secara hukum atau berubah fungsi diam-diam?

HUKUM TANAH DAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA

• UUPA 1960

- Menjamin hak atas tanah dan kepemilikan adil.
- Menempatkan negara sebagai pengelola tanah untuk rakyat.

• UU No. 2 Tahun 2012

- Atur prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- Wajibkan konsultasi publik dan kompensasi yang adil.

• Masalah Utama

- Inkonsistensi hukum dan tumpang tindih aturan.
- Aparat keamanan digunakan untuk memaksakan pembebasan lahan.
- Masyarakat lokal kerap tak punya akses ke jalur hukum

kasikan sebagai “kawasan hutan negara” tanpa partisipasi publik.

- Korporasi dan negara kerap bekerja sama mengalihkan status lahan demi proyek investasi.

Indonesia tak kekurangan komitmen, baik di panggung global maupun dalam teks hukum nasional. Tapi masalahnya bukan pada niat, melainkan pada pelaksanaan. Jika negara terus gagal melindungi hak tanah warga dan membiarkan ekspansi industri tanpa akuntabilitas, maka janji iklim tak lebih dari retorika.

Jurnalis memiliki peran penting untuk menautkan dua narasi ini: janji negara kepada dunia, dan kenyataan yang dihadapi warga di desa-desa yang terdampak. Bagian selanjutnya akan men-dalami hak asasi manusia dan standar internasional yang dapat digunakan untuk membongkar ketimpangan ini.

ANGKA DAN FAKTA PENTING

- 2.710 konflik agraria tercatat (2015–2022)
- 1,7 juta keluarga terdampak
- 5,8 juta hektare luas wilayah bersengketa

FAKTA KUNCI

- Banyak konflik lahan dipicu proyek energi dan pertambangan.
- Tanah masyarakat sering diklasifi-

OMNIBUS LAW, TANAH ADAT, DAN RISIKO KETIMPANGAN STRUKTURAL

SIAPA YANG DIUNTUNGAN DARI DEREGULASI?

Disahkan pada 2020 di tengah gelombang protes nasional, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law diklaim sebagai solusi penyederhanaan regulasi dan pendorong investasi. Namun, kenyataannya, banyak pasal di dalamnya justru membuka celah bagi penguasaan lahan skala besar dan eksploitasi wilayah adat.

PERAN BANK TANAH DALAM KONFLIK AGRARIA

- **Bank Tanah:** diberi kewenangan untuk mengelola tanah milik negara dan memberikan Hak Pengelolaan (HPL) hingga 80 tahun kepada pihak ketiga.
- **Risiko utama:** konsentrasi tanah di tangan investor besar, pengusuran komunitas adat, dan pengabaian prinsip keadilan spasial.

Mekanisme	Tujuan Resmi	Masalah yang Diidentifikasi
Bank Tanah	Optimalisasi lahan negara	Tidak transparan, berpihak pada kepentingan komersial
HPL 80 tahun	Kepastian hukum bagi investor	Mengabaikan keberadaan masyarakat adat dan lokal

HAK ATAS TANAH ADAT: DIKUKUHKAN, NAMUN DIABAIKAN

- **Konstitusi dan UUPA 1960:** mengakui hak ulayat masyarakat adat, tetapi hanya jika tidak bertentangan dengan "kepentingan nasional."
- **Putusan MK No. 35/2012:** hutan adat bukan hutan negara. Implementasi lambat dan tidak menyeluruh.
- **Peraturan Menteri ATR No. 18/2019:** membuka jalur pengaku-

an hukum atas tanah adat, tetapi prosedurnya kompleks dan minim sosialisasi.

PERTANYAAN INVESTIGATIF

- Apakah kawasan yang dikuasai Bank Tanah sebelumnya dihuni atau dikelola oleh komunitas lokal?
- Apakah masyarakat adat mengetahui hak mereka untuk mengajukan pengakuan hukum atas tanah ulayat?
- Apakah proses FPIC dilakukan sebe-

lum wilayah adat dialihkan untuk proyek?

JURNALISME YANG MEMBONGKAR STRUKTUR

Omnibus Law telah menjadi simbol pergeseran hukum agraria ke arah yang lebih korporatif. Ketika regulasi mendorong konsolidasi lahan dan mengecilkan perlindungan adat, maka yang terjadi bukan hanya konflik, tetapi pembungkaman hak-hak dasar.

Jurnalis perlu memosisikan liputan bukan hanya sebagai pengawas kebijakan, tetapi sebagai penelusur relasi kuasa yang menentukan siapa yang berhak tinggal, dan siapa yang dikorbankan.

ANTI-KORUPSI DAN TAMBANG ILEGAL: MENGUNGKAP JEJARING KEKUASAAN DI BALIK INDUSTRI NIKEL

KETIKA TAMBANG JADI LADANG KORUPSI

Pemerintah Indonesia memiliki kerangka hukum yang lengkap untuk mengatur industri nikel. Namun, di lapangan, hukum kerap dikalahkan oleh praktik tambang ilegal yang dibungkus jaringan kekuasaan. Bagian ini mengurai bagaimana korupsi dalam pembebasan lahan, lemahnya pengawasan, dan perlindungan terhadap tambang ilegal menjadi akar dari ketimpangan dan krisis lingkungan.

KORUPSI DALAM AKUISISI LAHAN

- Banyak pemilik lahan hanya menerima kompensasi sepihak yang nilainya jauh di bawah harga pasar.
- Intimidasi sering digunakan untuk menekan warga agar menyerahkan tanah.
- Dokumen kepemilikan resmi pun sering kali tidak cukup kuat melindungi hak warga.

TAMBANG ILEGAL MERUSAK PASAR DAN HUKUM

- Operasi tambang tanpa IUP dan AMDAL tetap berjalan luas di lapangan.
- Tambang ilegal menciptakan distorsi harga, merusak lingkungan, dan merugikan perusahaan yang taat aturan.
- Dukungan dari aktor politik lokal dan aparat keamanan membuat upaya pemberantasan tidak efektif.

LEMAHNYA INSTITUSI PENGAWAS DAN PENEGAKAN HUKUM

- Kurangnya pengawasan yang independen menjadikan pelanggaran tidak ditindak.
- Penegakan hukum cenderung selektif: kecil dihukum, besar dilindungi.
- Jejaring kekuasaan di daerah sering kali melibatkan kepala daerah, aparat, dan pemilik konsesi.

TABEL PETA RISIKO KORUPSI DALAM INDUSTRI NIKEL

Tahap	Risiko Korupsi	Dampak Langsung
Akuisisi lahan	Kompensasi sepihak, intimidasi	Warga kehilangan tanah secara tidak adil
Izin operasi	Penyalahgunaan kewenangan	Tambang ilegal terus berkembang
Pengawasan	Ketidakhadiran institusi	Kerusakan lingkungan tidak terpantau

PERTANYAAN INVESTIGATIF

- Apakah warga menerima kompensasi yang adil dan setara?
- Apakah ada intimidasi dari aparat saat proses pembebasan lahan?
- Siapa yang mengoperasikan tambang ilegal di wilayah tersebut?
- Apakah aparat lokal pernah mengambil tindakan tegas terhadap tambang ilegal?

STRATEGI MELIPUT KETIMPANGAN STRUKTURAL

Tambang ilegal bukan hanya urusan ekonomi ilegal. Ia adalah indikator runtuhnya sistem hukum, ketika hukum tunduk pada uang dan kekuasaan. Jurnalis perlu mengejar jejak kekuasaan di balik operasi ilegal: siapa yang melindungi, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dibungkam.

Bagian berikutnya akan membahas hak-hak asasi manusia yang paling sering dilanggar dalam konteks industri nikel, dan bagaimana jurnalis dapat menggunakan standar internasional untuk menguatkan liputan mereka.

STANDAR HUKUM INTERNASIONAL YANG RELEVAN

Kategori	Volume Air/Hari	Akses Fisik	Risiko Kesehatan
	100+ liter	Tidak ada	Tidak ada
 Menengah	50 liter	Rendah	Rendah
 Dasar	20 liter	Tidak lebih dari 30 menit	Sedang
 Tidak Layak	kurang dari 20 liter	—	Tinggi

■ Optimal ■ Informasional

AIR ADALAH HAK, BUKAN KOMODITAS

Di kawasan tambang nikel, konflik soal air kerap dianggap persoalan teknis. Padahal, dalam hukum internasional, air diakui sebagai hak asasi manusia. Bagian ini memberi kerangka hukum dan indikator praktis bagi jurnalis untuk menyelidiki pelanggaran hak atas air bersih di wilayah tambang.

APA ITU HAK ATAS AIR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL?

- Hak setiap individu atas air yang cukup, aman, dapat diakses, dan terjangkau untuk kebutuhan dasar seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan sanitasi.
- Berlaku untuk semua orang, termasuk komunitas adat, petani kecil, dan masyarakat pedesaan.

STANDAR PBB DAN WHO TENTANG AKSES AIR

Tingkat Akses	Volume per Hari	Ciri Akses	Risiko Kesehatan
Optimal	>100 liter/orang/hari	Beberapa titik, terus-menerus	Rendah
Menengah	~50 liter/orang/hari	Satu titik dekat lokasi	Sedang
Dasar	<20 liter/orang/hari	Jarak >100 m atau waktu tempuh >5 menit	Tinggi

AIR UNTUK PERTANIAN DAN PENG-HIDUPAN ADAT

- Standar internasional mengakui air juga penting untuk:
 - Pertanian subsisten
 - Perikanan tradisional
 - Ritual budaya atau kegiatan adat
- Peliputan air harus mempertimbangkan penggunaan kolektif di luar konsumsi domestik.

KEWAJIBAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

- Menjamin ketersediaan air minimum secara adil.
- Mencegah pencemaran atau pengurasan air oleh pihak ketiga (misalnya perusahaan tambang).
- Menyediakan infrastruktur air di wilayah rentan dan minim akses.
- Memastikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi sumber air mereka.

KEWAJIBAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

- Apakah kualitas air berubah (berwarna, berbau, menyebabkan gatal, dll) setelah tambang beroperasi?
- Apakah warga harus berjalan lebih

jauh atau membayar lebih mahal untuk mendapat air?

- Apakah sumber air digunakan oleh perusahaan tanpa konsultasi atau kompensasi?
- Apakah warga tahu siapa yang mengelola atau memiliki sumur dan saluran air di daerah mereka?

MENGKAITKAN LIPUTAN AIR DENGAN HAK ASASI

Krisis air tidak bisa dilepaskan dari struktur kekuasaan dan kelalaian negara. Bila perusahaan mencemari atau mengeksploitasi air, dan pemerintah membiarkannya, maka itu adalah pelanggaran hak. Jurnalis yang memahami standar hukum internasional dapat mengubah liputan lingkungan menjadi liputan HAM yang kuat dan tak terbantahkan.

Bagian berikutnya akan membahas hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam peliputan tentang industri ekstraktif seperti nikel.

HAK PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS: SIAPA YANG DIAJAK BICARA, SIAPA YANG DIABAIKAN

PARTISIPASI BUKAN SEREMONI, TETAPI HAK

Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan bukan sekadar etika baik, melainkan hak asasi manusia yang dijamin dalam hukum internasional. Bagian ini menjelaskan bagaimana jurnalis dapat memverifikasi apakah partisipasi masyarakat dalam proyek tambang dijalankan secara bermakna atau hanya sebagai formalitas administratif.

HAK PARTISIPASI MENURUT STANDAR INTERNASIONAL

- Partisipasi harus:
 - **Aktif**: masyarakat benar-benar diikutsertakan, bukan hanya diberi tahu.
 - **Bebas**: tanpa tekanan atau intimidasi.
 - **Bermakna**: memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan akhir.
- Standar ini ditegaskan dalam berbagai dokumen HAM internasional, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

STANDAR PBB DAN WHO TENTANG AKSES AIR

Pertanyaan Kunci	Tujuan	Indikator di Lapangan
Apakah ada pertemuan konsultasi publik sebelum proyek dimulai?	Menguji transparansi awal	Undangan, notulensi, kehadiran warga
Siapa yang diundang dan siapa yang bicara dalam konsultasi?	Menilai keterwakilan	Partisipasi kelompok rentan, masyarakat adat
Apakah AMDAL dipublikasikan dalam bahasa yang mudah dipahami warga?	Mengukur akses informasi	Dokumen tersedia di desa/kecamatan
Apakah warga takut menyuarakan keberatan?	Mengidentifikasi represi	Kesaksian warga tentang intimidasi

TRANSPARANSI TANPA AKUNTABILITAS ADALAH OMONG KOSONG

Partisipasi hanya bermakna jika warga memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan kekuatan untuk mempengaruhi hasil. Jurnalis yang mengungkap pelanggaran partisipasi dapat menunjukkan bagaimana proyek-proyek skala besar dijalankan dengan logika sepihak yang mengabaikan hak kolektif.

Dalam Bagian selanjutnya, kita akan membahas hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, dan bagaimana jurnalis dapat menggunakannya sebagai kerangka kerja dalam liputan investigatif tentang krisis ekologis.

HAK ATAS INFORMASI DAN PRINSIP FPIC: BENTENG TERAKHIR WILAYAH ADAT

PENDAHULUAN: SAAT PROYEK MASUK TANPA PEMBERITAHUAN

Terlalu sering, proyek besar seperti pertambangan atau pembangunan kawasan industri muncul begitu saja di wilayah komunitas tanpa proses konsultasi. Padahal, menurut hukum internasional, warga, terutama masyarakat adat, berhak diberi informasi dan berpartisipasi

pasi penuh dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut tanah dan sumber daya mereka.

APA ITU FPIC – DAN MENGAPA IA SANGAT PENTING?

FPIC: *Free, Prior and Informed Consent* atau **Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan**.

FPIC meng- haruskan

- Bebas: tanpa tekanan, intimidasi, atau paksaan.
- Didahulukan: dilakukan sebelum proyek dirancang atau dilaksanakan.
- Informasional: seluruh informasi disampaikan dengan jujur, lengkap, dan dalam bahasa/konteks budaya yang dipahami masyarakat.

Informasi yang wajib disampaikan

- Tujuan dan skala proyek
- Risiko lingkungan dan sosial
- Rencana pembagian manfaat
- Dampak jangka panjang, termasuk yang tidak bisa dipulihkan

Proses ini harus menghormati struktur adat dan sistem pengambilan keputusan tradisional.

Bila FPIC dilanggar: apa yang berhak dituntut masyarakat?

- **Pengembalian tanah** kepada komunitas (jika masih memungkinkan secara fisik dan hukum)
- **Kompensasi yang adil dan setara**, berdasarkan penilaian independen
- **Alternatif tanah atau sumber daya** yang bernilai setara dan memiliki status hukum jelas
- **Reparasi finansial** atau bentuk pemulihan lain yang disepakati secara kolektif

PERAN JURNALIS: MENYOROTI ABSENNYA FPIC

Elemen yang Harus Ada	Apa yang Perlu Dicek	Pertanyaan Investigatif
Konsultasi awal	Apakah warga diajak bicara sebelum proyek dimulai?	Kapan dan bagaimana proses konsultasi dilakukan?
Akses informasi	Apakah warga memahami isi AMDAL?	Apakah dokumen diberikan dalam bahasa yang dipahami?
Perwakilan sah	Apakah struktur adat dihormati?	Siapa yang diajak bicara oleh pemerintah/perusahaan?
Persetujuan sukarela	Apakah ada tekanan terhadap warga?	Apakah ada laporan intimidasi atau manipulasi?

FPIC BUKAN ADMINISTRASI, MELAINKAN HAK YANG MENGIKAT

FPIC bukan sekadar prosedur pelengkap. Ia adalah hak hukum yang jika dilanggar, dapat dijadikan dasar untuk menggugat negara atau perusahaan. Dalam peliputan tambang, jurnalis harus menempatkan FPIC sebagai indikator utama keabsahan proyek. Tanpa FPIC, setiap aktivitas di wilayah adat adalah bentuk pelanggaran.

Bagian selanjutnya akan mengulas hak atas pemulihan dan ganti rugi, serta bagaimana jurnalis dapat menilai apakah komunitas terdampak mendapatkan keadilan atau hanya janji kosong.

HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BERSIH, SEHAT, DAN BERKELANJUTAN: DARI EKOLOGI KE HAK ASASI MANUSIA

INI BUKAN HANYA CERITA LINGKUNGAN – INI CERITA HAK ASASI

Pada tahun 2022, Majelis Umum PBB mengakui secara resmi bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hak ini kini tertanam dalam hukum nasional di lebih dari 150 negara, dan menjadi standar penting dalam peliputan krisis ekologis, termasuk dalam industri nikel.

APA SAJA YANG TERMASUK DALAM “LINGKUNGAN YANG SEHAT”?

Menurut David Boyd, Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Lingkungan, hak ini mencakup:

- Akses terhadap air, udara, dan tanah yang tidak tercemar
- Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem lokal
- Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berdampak lingkungan
- Akses terhadap informasi lingkungan dan transparansi data

- Pemulihan dan akuntabilitas atas pelanggaran lingkungan
- Prinsip keadilan lingkungan – tidak boleh ada kelompok yang lebih terdampak secara sistematis karena kemiskinan, lokasi, atau status sosial

MENGAPA HAK LINGKUNGAN SEHAT PENTING

- Tambang dan smelter nikel berdampak langsung pada:
 - Kualitas udara (emisi debu, sulfur, logam berat)
 - Kualitas air (limbah cair, sedimen, logam berat)
 - Keberlanjutan tanah dan produktivitas lahan
- Proyek sering dilakukan di wilayah:
 - Dengan nilai ekologi tinggi
 - Yang dihuni oleh komunitas yang bergantung pada hutan dan sungai
- Kehilangan akses terhadap tanah dan air bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi pelanggaran hak.

PANDUAN INVESTIGATIF UNTUK JURNALIS

Aspek	Pertanyaan Investigatif	Bukti Lapangan
Degradasi lingkungan	Apakah ada bukti pencemaran udara, air, atau tanah?	Foto, laporan warga, data laboratorium
Konsultasi	Apakah warga tahu dan dilibatkan dalam perizinan?	Dokumen, testimoni, notulen publik
Tindakan negara	Apakah pemerintah merespons keluhan lingkungan?	Surat resmi, pengaduan, tanggapan dinas
Pemulihan	Apakah ada bentuk ganti rugi atau rehabilitasi?	aKompensasi, proyek restorasi, mediasi adatYa

HAK LINGKUNGAN ADALAH FONDASI KEADILAN IKLIM

Liputan tentang lingkungan tidak bisa lagi dipisahkan dari pembelaan hak. Saat proyek industri merusak hutan, mencemari sungai, atau mempersempit ruang hidup warga tanpa perlindungan yang setara, itu bukan hanya kerusakan alam, itu pelanggaran HAM. Jurnalis memiliki peran vital untuk memperlihatkan garis penghubung antara kehancuran ekologis dan ketimpangan struktural.

Bagian selanjutnya akan menutup rangkaian ini dengan panduan untuk memetakan kerusakan dan merancang liputan investigatif yang berorientasi pada keadilan ekologis dan sosial.

HAK ATAS KEHIDUPAN LAYAK – BATAS AKHIR EKSPLOITASI SUMBER DAYA

Di wilayah-wilayah kaya nikel, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan alasan untuk menoleransi kerusakan lingkungan dan pelanggaran sosial. Tapi menurut standar hukum internasional yang sah dan mengikat, pembangunan tidak boleh mengorbankan hak dasar masyarakat. Bagian ini menegaskan bahwa hak atas kehidupan layak adalah batas etis dan hukum yang tidak bisa ditawar.

LANDASAN HUKUM INTERNASIONAL: STANDAR YANG MENGIKAT INDONESIA

- **International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)** – diratifikasi Indonesia tahun 2006:
 - Hak atas standar hidup yang layak
 - Hak atas air bersih

- Hak atas kesehatan, pendidikan, dan perumahan
- Prinsip: non-diskriminasi dan pemenuhan progresif
- **International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR):**
 - **Pasal 1:** "Dalam hal apa pun, suatu bangsa tidak boleh dirampas dari sumber penghidupannya sendiri."
- Mengizinkan proyek yang mengusir warga tanpa menyediakan alternatif yang setara.
- Mengabaikan akses masyarakat terhadap layanan dasar (air, pendidikan, kesehatan) demi investasi.
- Negara wajib:
 - Mengatur perusahaan agar tidak melanggar hak ekonomi dan sosial warga.
 - Menjamin bahwa eksploitasi sumber daya memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
 - Menyediakan mekanisme aduan dan pemulihan yang adil dan dapat diakses.

KONTEKS TAMBANG DAN HILIRISASI NIKEL?

- Negara tidak boleh:
 - Membiarkan udara, air, atau tanah tercemar oleh tambang tanpa pengawasan dan remediasi.

PANDUAN UNTUK LIPUTAN BERBASIS HAK

Hak yang Dilindungi	Pertanyaan Investigatif	Indikator Lapangan
Hak atas air & udara bersih	Apakah kualitas lingkungan memburuk sejak tambang masuk?	Keluhan warga, data lingkungan, kasus penyakit
Hak atas penghidupan	Apakah tambang mengusir atau merusak lahan pertanian/perikanan?	Kehilangan panen, migrasi paksa, perubahan pola kerja
Hak atas rumah dan kesehatan	Apakah warga tinggal dekat fasilitas pencemar tanpa perlindungan?	Lokasi rumah, data kesehatan publik, minimnya fasilitas

HAK ASASI TIDAK BOLEH DIKORBANKAN DEMI NIKEL

Hak atas kehidupan layak bukanlah hambatan pembangunan, tapi landasan keadilan. Negara punya kewajiban hukum, bukan sekadar moral, untuk menjamin bahwa eksploitasi nikel tidak menjadikan warga sebagai korban. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa di balik angka pertumbuhan, ada hak-hak dasar yang terancam atau dilanggar.

Rangkaian Bagian ini bertujuan memberikan alat, landasan hukum, dan sudut pandang yang kuat untuk liputan yang membongkar ketimpangan, bukan sekadar mencatat perkembangan industri.

HAK ATAS KESEHATAN – MENYINGKAP RISIKO TAK TERLIHAT DALAM INDUSTRI NIKEL

Ketika membahas hak atas kesehatan, yang sering terpikir adalah rumah sakit dan akses obat. Namun, menurut hukum internasional, kesehatan juga berarti bebas dari ancaman lingkungan yang merusak tubuh secara perlahan, polusi udara, air tercemar, dan limbah bera-

cun. Bagian ini menyoroti bagaimana kegiatan pertambangan nikel dapat melanggar hak atas kesehatan jika tidak dikendalikan secara ketat.

KERANGKA HUKUM: HAK YANG MENGIKAT NEGARA DAN MEMBATASI PERUSAHAAN

- **International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR):**
 - Hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12)
 - Pemerintah wajib:
 - Menjamin ketersediaan air minum yang aman dan layak
 - Menyediakan sanitasi dasar yang memadai
 - Melindungi masyarakat dari paparan zat berbahaya dan kondisi lingkungan yang merugikan
- Hak ini bersifat universal dan non-diskriminatif: tidak boleh ada kelompok yang dibiarkan lebih rentan karena status ekonomi, lokasi geografis, atau etnisitas.

RISIKO LINGKUNGAN YANG BERDAMPAK LANGSUNG PADA KESEHATAN

Sumber Risiko	Dampak Kesehatan	Tanggung Jawab Negara
Polusi udara dari smelter	ISPA, bronkitis, iritasi mata	Monitoring kualitas udara, regulasi emisi
Limbah cair ke sungai	Gangguan pencernaan, keracunan logam berat	Inspeksi AMDAL, pengendalian limbah
Deforestasi dan debu tambang	Infeksi saluran pernapasan, penurunan kualitas hidup	Reklamasi, pembatasan aktivitas tambang di pemukiman

PERTANYAAN INVESTIGATIF

- Apakah terdapat peningkatan gangguan kesehatan sejak tambang beroperasi?
- Apakah warga memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi?
- Apakah ada pemantauan kualitas udara dan air oleh lembaga independen?
- Apakah warga tahu ke mana harus mengadu ketika kesehatannya terdampak?

POLUSI ADALAH BENTUK KEKERASAN TERHADAP MASYARAKAT

Hak atas kesehatan adalah jembatan antara hak lingkungan dan hak hidup. Ia bukan sekadar layanan medis, tapi perlindungan preventif terhadap bahaya yang muncul dari eksploitasi sumber daya. Jurnalis perlu memahami bahwa setiap titik polusi adalah titik awal krisis kesehatan, dan bahwa negara wajib memastikan perlindungan

ini, bukan menyerahkannya pada perusahaan.

Rangkaian Bagian ini ditutup dengan seruan untuk membingkai ulang liputan industri ekstraktif sebagai liputan hak asasi manusia. Bukan sekadar ekonomi, bukan sekadar lingkungan, tapi soal siapa yang hidup, siapa yang menderita, dan siapa yang bertanggung jawab.

HAK ATAS KESEHATAN DALAM INDUSTRI NIKEL: MENEGAKKAN KEWAJIBAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

HAK ATAS KESEHATAN LEBIH LUAS DARI SEKEDAR AKSES KE RUMAH SAKIT

Hak atas kesehatan menurut hukum internasional bukan hanya soal pelayanan medis atau ketersediaan obat, tetapi juga perlindungan terhadap ancaman lingkungan yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Dalam konteks industri nikel, polusi, limbah beracun, dan deforestasi adalah risiko yang dapat merusak kesehatan secara perlahan dan sistemik jika tidak dikendalikan. Bagian ini menguraikan bagaimana kewajiban negara dan pengawasan terhadap perusahaan tambang adalah kunci untuk menjaga hak ini.

KERANGKA HUKUM: HAK YANG MENGIKAT NEGARA DAN MEMBATASI AKSI KORPORASI

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) menetapkan hak atas kesehatan sebagai hak universal dan non-diskriminatif (Pasal 12), yang mencakup kewajiban pemerintah untuk:

- Menjamin ketersediaan air minum yang aman dan layak konsumsi,
- Menyediakan sanitasi dasar yang memadai,
- Melindungi masyarakat dari paparan zat berbahaya dan kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan.

Dalam konteks ini, negara wajib memastikan bahwa operasi pertambangan nikel tidak menghasilkan polusi atau limbah beracun yang melanggar hak atas kesehatan warga.

RISIKO LINGKUNGAN DAN DAMPAK KESEHATAN

Sumber Risiko	Dampak Kesehatan	Tanggung Jawab Negara
Polusi udara dari smelter	Penyakit ISPA, bronkitis, iritasi saluran napas	Regulasi emisi dan monitoring kualitas udara
Limbah cair ke sungai	Keracunan logam berat, gangguan pencernaan	Pengawasan AMDAL dan pengendalian limbah
Deforestasi dan debu tambang	Infeksi saluran pernapasan, penurunan kualitas hidup	Reklamasi dan pembatasan kegiatan tambang di sekitar pemukiman

HAK MASYARAKAT ADAT: KETEGANGAN ANTARA INDUSTRI DAN PENGAKUAN WILAYAH ADAT

INDUSTRI NIKEL DAN WILAYAH ADAT SERING TUMPANG TINDIH

Perluasan industri nikel di Indonesia bukan hanya soal investasi dan pembangunan. Di banyak wilayah, ekspansi ini berbenturan langsung dengan tanah-tanah yang telah lama dihuni dan dikelola oleh masyarakat adat. Ketika izin industri diberikan tanpa konsultasi atau pengakuan terhadap komunitas ini, hak asasi manusia bisa dilanggar secara sistematis. Bagian ini membahas bagaimana hukum internasional menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak kolektif atas tanah, budaya, dan sumber daya mereka.

KERANGKA HUKUM: PENGAKUAN INTERNASIONAL, KEWAJIBAN NASIONAL

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP):

Hak yang dijamin:

- Hak untuk menentukan nasib sendiri
- Hak atas keberlangsungan budaya
- Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional dimiliki, dihuni, atau digunakan

Kewajiban Negara:

- Melindungi wilayah adat dari perampasan
- Memberikan pemulihan atas pelanggaran hak
- Menghormati hak atas konsultasi dan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) atas semua proyek yang berdampak

Catatan: Ketentuan ini berlaku baik untuk aktivitas yang dilakukan oleh negara maupun oleh korporasi swasta.

FAKTA HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA

- Indonesia mendukung UNDRIP pada 2007, tetapi hingga kini belum mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang diajukan ke parlemen sejak 2012.
- Posisi resmi negara yang menyatakan bahwa sebagian besar warga Indonesia adalah masyarakat adat telah memicu resistensi terhadap pengakuan hak kolektif secara formal.
- Walau demikian, norma internasional tetap mengikat dan dapat dijadikan rujukan dalam advokasi maupun peliputan.

PERTANYAAN INVESTIGATIF

- Apakah wilayah adat telah dikonsultasikan sebelum izin pertambangan dikeluarkan?
- Apakah masyarakat adat menerima informasi yang lengkap dan bebas tekanan?
- Apakah ada mekanisme pemulihan jika tanah adat telah dirampas?
- Apakah perusahaan menghormati nilai budaya dan praktik tradisional di wilayah operasinya?

PENGAKUAN TANPA PENGESAHAN ADALAH KETIMPANGAN STRUKTURAL

Hak masyarakat adat bukanlah kebaikan hati negara, melainkan kewajiban hukum. Ketika tambang berdiri di atas tanah adat tanpa persetujuan yang sah, pelanggaran bukan hanya administratif, tetapi hak asasi manusia. Jurnalis perlu memahami bahwa peliputan konflik lahan adalah peliputan hak kolektif dan keadilan struktural.

Bagian ini mendorong pembersihan ulang terhadap peliputan industri nikel: bukan hanya urusan ekonomi dan lingkungan, tapi tentang siapa yang didengar, siapa yang dikesampingkan, dan siapa yang berjuang mempertahankan tanah yang diwariskan turun-temurun.

HAK BUDAYA: MEMBACA KONFLIK LINGKUNGAN MELALUI LENS HAK ASASI MANUSIA

BUDAYA BUKAN TRADISI SEMATA, TAPI HAK YANG DILINDUNGI

Dalam peliputan isu lingkungan, budaya sering kali dianggap sekadar adat istiadat atau praktik lokal. Namun, dalam kerangka hak asasi manusia, budaya adalah hak fundamental yang punya konsekuensi hukum, terutama dalam konflik atas tanah, sumber daya, dan ekosistem.

Bagian ini membantu jurnalis mengenali bagaimana aktivitas industri dapat mengancam hak budaya masyarakat adat dan lokal, serta bagaimana hukum internasional memposisikan negara sebagai penjamin, bukan pelanggar, hak ini.

KERANGKA HUKUM: HAK YANG MELINDUNGI IDENTITAS DAN AKSES ATAS TANAH

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR):

- Hak untuk menentukan nasib sendiri (Pasal 1)
- Hak minoritas untuk menjalankan budaya mereka sendiri (Pasal 27)

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP):

- Hak masyarakat adat untuk mem-

pertahankan dan mengembangkan institusi politik, ekonomi, dan sosial mereka

- Hak untuk menjalankan aktivitas ekonomi tradisional seperti berburu, menangkap ikan, dan bertani
- Negara wajib mencegah tindakan yang melemahkan identitas, nilai, atau akses terhadap tanah dan sumber daya

ANALISIS RISIKO TERHADAP HAK BUDAYA

- Sumber Risiko Dampak terhadap Hak Budaya Tanggung Jawab Negara
- Ekspansi tambang nikel tanpa persetujuan Kehilangan akses terhadap situs sakral dan lahan garapan Konsultasi bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC)
- Deforestasi di wilayah adat Hilangnya ruang hidup dan sistem kepercayaan lokal Pengakuan dan perlindungan wilayah adat secara hukum
- Pembangunan infrastruktur besar-besaran Disrupsi atas praktik budaya dan relasi sosial AMDAL yang partisipatif dan akuntabel

PERTANYAAN INVESTIGATIF

- Apakah proyek industri dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat?
- Apakah masyarakat lokal mengalami kehilangan akses terhadap tanah, hutan, atau laut?
- Apakah terdapat proses konsultasi yang transparan dan partisipatif?
- Apakah aktivitas ekonomi tradisional terganggu atau terhenti?

MELIPUT BUDAYA ADALAH MELIPUT HAK

Hak budaya bukan konsep abstrak. Ia menentukan siapa yang boleh tinggal, siapa yang boleh bertani, siapa yang dianggap punya hak atas wilayah. Dalam konteks pertambangan dan proyek ekstraktif lainnya, pelanggaran terhadap hak budaya bisa berarti penghapusan paksa identitas kolektif. Jurnalis harus memahami bahwa setiap konflik lahan adalah juga konflik hak budaya, dan bahwa peliputan yang tajam harus selalu bertanya: siapa yang kehilangan, siapa yang menentukan, dan siapa yang bertanggung jawab.

KERUSAKAN LINGKUNGAN: PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

LINGKUNGAN BERSIH ADALAH HAK DASAR MANUSIA

Liputan lingkungan pada dasarnya juga merupakan liputan hak asasi manusia. Kerusakan ekosistem bukan sekadar isu teknis atau ilmiah, melainkan ancaman langsung terhadap hak hidup, kesehatan, dan martabat manusia.

Pemerintah secara hukum berkewajiban mencegah kerusakan lingkungan yang dapat diperkirakan sebelumnya dan yang mengancam hak asasi manusia, termasuk yang terkait dengan perubahan iklim.

KERANGKA HUKUM: KEWAJIBAN NEGARA, BUKAN PILIHAN KEBI- JAKAN

UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment:

Negara wajib:

- Mengantisipasi dan mencegah kerusakan lingkungan yang dapat diperkirakan
- Meminimalkan dampak jika kerusakan tak terhindarkan
- Menjamin akses masyarakat terhadap pemulihan

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR):

Kegagalan bertindak atas risiko lingkungan yang sudah dapat diperkirakan, terutama jika pemerintah tidak menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mengurangi dampak, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

UN Human Rights Committee:

Degradasi lingkungan dan perubahan iklim adalah ancaman serius terhadap hak untuk hidup. Negara harus:

- Mengambil langkah konkret menjaga dan melindungi lingkungan
- Mencegah kerusakan akibat tindakan aktor publik maupun swasta

DAMPAK LANGSUNG KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP HAK ASASI

Sumber Kerusakan	Dampak Hak Asasi Manusia	Kewajiban Negara
Deforestasi masif	Hilangnya akses lahan, konflik sosial	Perlindungan hak atas tanah
Polusi industri	Paparan bahan beracun, gangguan kesehatan	Regulasi emisi, pengawasan
Perubahan iklim	Bencana alam, kehilangan penghidupan	Kebijakan adaptasi dan mitigasi

PERTANYAAN INVESTIGATIF

- Apakah negara telah melakukan analisis risiko lingkungan sebelum mengizinkan proyek ekstraktif?
- Bagaimana regulasi dan penerapannya dilakukan terhadap perusahaan pelaku pencemaran?
- Apakah warga terdampak diberi informasi, akses pengaduan, dan pemulihan?
- Siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang menanggung akibatnya?

sional. Saat hutan menghilang, sungai tercemar, dan udara menjadi racun, pertanyaan sesungguhnya adalah: siapa yang bertanggung jawab?

JURNALISME LINGKUNGAN ADALAH JURNALISME HAK ASASI

Kewajiban hukum negara untuk mencegah kerusakan lingkungan bukan sekadar preferensi kebijakan, melainkan komitmen mengikat. Pelanggaran terhadap lingkungan adalah pelanggaran terhadap manusia. Bagi jurnalis, peliputan isu ini bukanlah advokasi, tetapi jurnalisme akuntabilitas yang berakar pada hukum interna-

HAK ATAS MAKANAN DAN KESEHATAN: KETIKA POLUSI MENGANCAM HIDUP DAN PENGHIDUPAN

KETIKA SUMBER MAKANAN HILANG, HAK ASASI TERANCAM

Hak atas makanan dan kesehatan bukan hanya soal tersedianya rumah sakit dan pangan murah. Dalam hukum internasional, kedua hak ini saling terkait dan menyatu dengan lingkungan: ketika sungai tercemar, laut kehilangan ikan, atau hutan digunduli, masyarakat kehilangan akses terhadap sumber makanan tradisional dan terpapar bahaya kesehatan. Bagian ini menyoroti bagaimana proyek industri, terutama pertambangan dan pemurnian, dapat merusak pondasi kehidupan masyarakat jika tidak diawasi ketat.

KERANGKA HUKUM: KEDAULATAN ATAS PANGAN DAN TUBUH

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR):

- Hak atas standar hidup yang layak, termasuk makanan yang cukup (Pasal 11)
- Hak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12)

Pemerintah wajib:

- Menjamin akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan
- Melindungi masyarakat dari pencemaran yang merusak hasil pertanian, perikanan, dan kesehatan
- Mencegah perampasan lahan dan hilangnya akses terhadap sumber daya alam

Hak ini bersifat universal dan saling bergantung: rusaknya satu aspek dapat memicu pelanggaran berlapis.

SUMBER KERUSAKAN: INDUSTRI YANG MERUSAK EKOLOGI MAKANAN

Sumber Risiko	Dampak terhadap Makanan dan Kesehatan	Tanggung Jawab Negara
Polusi air dari tambang	Hasil tangkapan ikan menurun, keracunan logam berat	Uji kualitas air, rehabilitasi sungai
Debu dan limbah pabrik	Kontaminasi lahan pertanian, ISPA, iritasi kulit	Regulasi emisi, pengawasan industri
Deforestasi dan alih fungsi lahan	Kehilangan akses ke hutan, pangan tradisional hilang	Perlindungan wilayah adat dan komunitas lokal
Lalu lintas truk dan infrastruktur	Debu halus, kecelakaan, kebisingan ekstrem	Zonasi industri, perlindungan pemukiman

PERTANYAAN INVESTIGATIF

- Apakah hasil panen atau tangkapan ikan warga menurun setelah proyek dimulai?
 - Siapa yang terdampak paling parah? Adakah perbedaan dampak antara laki-laki dan perempuan?
- Apakah warga kehilangan akses ke lahan pertanian atau hutan tanpa ganti rugi memadai?
 - Adakah dokumentasi atau protes dari komunitas?
- Apakah ada peningkatan kasus penyakit kulit, gangguan pernapasan, atau diare?
 - Apa kata tenaga kesehatan lokal? Adakah data dari puskesmas atau rumah sakit?
- Apakah pemerintah dan perusahaan menyediakan data dampak lingkungan secara terbuka?
 - Jika tidak, siapa yang menyimpan data tersebut? Apakah publik tahu haknya atas informasi ini?

KETIKA TANAH DAN LAUT TERACUNI, KELAPARAN DAN PENYAKIT MENGINTAI

Hak atas makanan dan kesehatan adalah pengukur utama dampak pro-

yek industri terhadap masyarakat. Ketika proyek tambang merusak sungai, laut, dan hutan, ia bukan sekadar mengganggu alam, tapi merampas penghidupan dan mengancam hidup. Jurnalis perlu membingkai peliputan ini sebagai peliputan krisis hak asasi manusia, dan bertanya: siapa yang lapar, siapa yang sakit, dan siapa yang bertanggung jawab.

Rangkaian Bagian ini mengajak jurnalis untuk tidak berhenti di permukaan proyek, tapi masuk ke dapur warga, posyandu, dan kebun yang hilang. Karena di sanalah dampak sebenarnya terasa, dan dari sanalah peliputan yang bermakna bisa dimulai.

HAK ATAS AIR DAN SANITASI: KETIKA PROYEK INDUSTRI MENGERINGKAN SUMBER KEHIDUPAN

AIR BERSIH ADALAH HAK DASAR UNTUK HIDUP LAYAK

Umum PBB telah mengakui hak atas air dan sanitasi sebagai hak asasi manusia. Ini mencakup hak setiap orang untuk mendapatkan akses fisik dan ekonomi terhadap air yang cukup, aman, dan dapat diterima untuk kebutuhan pribadi serta domestik.

Namun, dalam praktiknya, hak ini kerap dilanggar. Proyek infrastruktur skala besar, seperti pertambangan, pembangkit listrik, dan perkebunan monokultur, sering menyebabkan gangguan serius terhadap sumber air masyarakat. Polusi dari limbah industri, penggunaan air dalam skala besar untuk proses produksi, dan perubahan aliran sungai bisa memicu krisis air lokal, mencemari sumber air, atau bahkan menghilangkan mata air sepenuhnya.

KERANGKA HUKUM: KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENJAMIN AKSES AIR BERSIH

Resolusi Majelis Umum PBB No. 64/292:

- Mengakui air bersih dan sanitasi sebagai hak asasi manusia yang esensial untuk menikmati kehidupan dan semua hak lainnya

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR):

- Menjamin hak setiap orang atas standar hidup yang layak, termasuk air dan sanitasi
- Negara wajib melindungi sumber daya air dari pencemaran dan eksploitasi berlebihan

Hak ini bersifat universal dan tidak boleh didiskriminasi. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat harus menjadi prioritas perlindungan.

DAMPAK LANGSUNG DARI INDUSTRI TERHADAP AKSES AIR

Sumber Gangguan	Dampak Terhadap Komunitas
Pengalihan aliran sungai	Hilangnya akses air bagi petani dan rumah tangga
Pengeboran sumur dalam oleh perusahaan	Penurunan permukaan air tanah, sumur warga mengering
Pencemaran oleh limbah tambang	Air berbau, berubah warna, menyebabkan gatal atau sakit
Konsesi industri di atas daerah re-sapan	Mata air menghilang, kekeringan musiman lebih parah

PERTANYAAN INVESTIGATIF

- Apakah warga harus berjalan lebih jauh untuk mendapatkan air dibanding sebelum proyek dimulai?
- Apakah kualitas air berubah (berbau, berwarna, menyebabkan gatal atau sakit)?
- Apakah ada perusahaan yang membendung sungai, mengebor sumur dalam, atau menggunakan air tanah dalam jumlah besar?
- Apakah pemerintah atau perusahaan menyediakan layanan air alternatif?
- Apakah narasi resmi menyalahkan warga atas kelangkaan air, alih-alih menyelidiki penyebab strukturnya?

KEHILANGAN AIR BERSIH ADALAH BENTUK PENGUSIRAN PERLAHAN

Hak atas air bukan sekadar soal teknis infrastruktur, tetapi menyangkut keberlanjutan hidup dan martabat manusia. Ketika sumber air menghilang atau tercemar karena proyek industri, masyarakat tidak hanya kehilangan akses, tapi juga kehilangan tanah, penghidupan, dan identitas kultural.

Bagi jurnalis, penting untuk melihat isu air sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Air bukan hanya sumber daya, tapi syarat mutlak untuk hidup. Maka, peliputan harus mampu

menyingkap relasi kuasa, tanggung jawab aktor, dan suara komunitas yang terdampak. Perlindungan atas air adalah perlindungan atas kehidupan itu sendiri.

HAK ATAS GANTI RUGI DAN PEMULIHAN: KETIKA KOMUNITAS TIDAK MENDAPAT KEADILAN SETELAH LINGKUNGANNYA RUSAK

KETIKA KERUSAKAN LINGKUNGAN TIDAK BERUJUNG PADA KEADILAN

Dalam banyak kasus pelanggaran hak atas lingkungan, warga yang dirugikan tidak hanya kehilangan tanah, akses terhadap air bersih, atau udara yang sehat, tetapi juga mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan keadilan. Padahal, menurut hukum hak asasi manusia, setiap individu berhak atas pemulihan yang efektif ketika hak-haknya dilanggar.

Pemulihan ini bisa berupa kompensasi finansial, pemulihan lingkungan, pengakuan publik atas pelanggaran, jaminan non-pengulangan, atau bentuk reparasi lainnya. Bagian ini menggarisbawahi pentingnya akses terhadap ganti rugi yang adil sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di tengah praktik industri ekstraktif seperti pertambangan nikel.

KERANGKA HUKUM: HAK ATAS PEMULIHAN SEBAGAI HAK ASASI YANG

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation (PBB, 2005):

Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia berat berhak atas:

- Kebenaran
- Keadilan
- Pemulihan (remedy)

Bentuk-bentuk pemulihan meliputi:

- Restitusi: mengembalikan keadaan seperti semula
- Kompensasi: pembayaran atas kerugian
- Rehabilitasi: layanan kesehatan, psikososial, hukum
- Kepuasan: pengakuan pelanggaran secara publik
- Jaminan non-pengulangan: reformasi struktural agar tidak terjadi lagi

Hak atas pemulihan ini bersifat universal dan mengikat negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi.

PERTANYAAN INVESTIGATIF

1. Apakah ada upaya warga untuk menuntut keadilan melalui jalur hukum, dan apakah proses itu berjalan adil? Jika gugatan masyarakat terus-menerus ditolak tanpa alasan jelas, ini bisa jadi indikasi bias sistemik atau pelemahan akses terhadap keadilan.
2. Apakah masyarakat terdampak menerima kompensasi yang mema-

dai dan sesuai? Banyak kasus di mana kompensasi terlalu kecil, diberikan dalam bentuk tidak relevan, atau hanya diterima oleh segelintir orang, bukan seluruh komunitas yang terdampak.

3. Apakah ada pemulihan lingkungan setelah terjadinya kerusakan akibat proyek atau bencana industri? Jika tidak, pemerintah dan perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak lingkungan dan kelalaian dalam pemulihan.
4. Apakah pelaku utama kerusakan lingkungan (misalnya, perusahaan atau pejabat) pernah dihukum atau dimintai pertanggungjawaban secara publik? Jika tidak ada satu pun pihak yang dimintai tanggung jawab, bisa jadi terjadi impunitas struktural.
5. Apakah pemerintah menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat terdampak? Tanpa saluran resmi yang bisa diakses, hak atas keadilan menjadi hampa dan membuka ruang bagi konflik berkepanjangan.

CATATAN PENTING: KETIMPANGAN KEKUASAAN DAN PERAN JURNALIS

Hak atas ganti rugi sering kali dihambat oleh ketimpangan kekuasaan antara

masyarakat dan pelaku industri besar. Perusahaan memiliki akses hukum yang lebih kuat, sumber daya yang lebih besar, dan hubungan politik yang bisa melindungi mereka dari tanggung jawab.

Peran jurnalis dalam menggambarkan ketimpangan ini, serta menyoroti proses hukum yang tidak transparan atau tidak adil, sangat penting untuk membangun tekanan publik. Peliputan yang tajam dan berkelanjutan dapat membuka ruang advokasi dan solidaritas lintas wilayah.

PEMULIHAN ADALAH UKURAN KEBERPIHAKAN NEGARA PADA KORBAN

Hak atas pemulihan tidak hanya menyangkut ganti rugi finansial, tapi juga mengembalikan martabat korban dan menjamin bahwa pelanggaran tidak terjadi lagi. Di tengah praktik ekstraksi yang merusak, jurnalis perlu mempertanyakan: siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dilindungi oleh sistem hukum saat ini. Jika keadilan hanya menjadi hak istimewa bagi yang kuat, maka peliputan yang mendalam adalah bentuk perlawanan yang sah dan perlu.

HAK ATAS GANTI RUGI DAN PEMULIHAN: KETIKA KOMUNITAS TIDAK MENDAPAT KEADILAN SETELAH LINGKUNGANNYA RUSAK

KETIKA KERUSAKAN LINGKUNGAN TIDAK BERUJUNG PADA KEADILAN

Dalam banyak kasus pelanggaran hak atas lingkungan, warga yang dirugikan tidak hanya kehilangan tanah, akses terhadap air bersih, atau udara yang sehat, tetapi juga mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan keadilan. Padahal, menurut hukum hak asasi manusia, setiap individu berhak atas pemulihan yang efektif ketika hak-haknya dilanggar.

Pemulihan ini bisa berupa kompensasi finansial, pemulihan lingkungan, pengakuan publik atas pelanggaran, jaminan non-pengulangan, atau bentuk reparasi lainnya. Bagian ini menggarisbawahi pentingnya akses terhadap ganti rugi yang adil sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di tengah praktik industri ekstraktif seperti pertambangan nikel.

KERANGKA HUKUM: HAK ATAS PEMULIHAN SEBAGAI HAK ASASI YANG

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation (PBB, 2005):

Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia berat berhak atas:

- Kebenaran
- Keadilan
- Pemulihan (remedy)

Bentuk-bentuk pemulihan meliputi:

- Restitusi: mengembalikan keadaan seperti semula
- Kompensasi: pembayaran atas kerugian
- Rehabilitasi: layanan kesehatan, psikososial, hukum
- Kepuasan: pengakuan pelanggaran secara publik
- Jaminan non-pengulangan: reformasi struktural agar tidak terjadi lagi

Hak atas pemulihan ini bersifat universal dan mengikat negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi.

PERTANYAAN INVESTIGATIF

1. Apakah ada upaya warga untuk menuntut keadilan melalui jalur hukum, dan apakah proses itu berjalan adil? Jika gugatan masyarakat terus-menerus ditolak tanpa alasan jelas, ini bisa jadi indikasi bias sistemik atau pelemahan akses terhadap keadilan.
2. Apakah masyarakat terdampak menerima kompensasi yang mema-